

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MAMASA

Yustina  
Universitas Negeri Makassar

## ABSTRAK

Yustina. 2020. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Mamasa. (dibimbing oleh Ketua Komisi Penasihat Prof.Dr.Rifdan,M.Si serta Anggota Komisi Penasihat Dr. Risma Niswaty,S.S.,M.Si).

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, agar mampu bersaing di tengah kompetisi kehidupan berbangsa yang semakin maju dan modern. Kementerian Pendidikan Nasional telah mengambil jalan untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kebijakan sertifikasi guru yang diatur di dalam Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan yang peraturan terbaru Permendikbud No 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan yang bertujuan adanya peningkatan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengkaji dan mendeskripsikan implementasi kebijakan sertifikasi guru SMP di Kabupaten Mamasa dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 2) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor determinan pendukung ssimplementasi kebijakan sertifikasi guru SMP di Kabupaten Mamasa, 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa untuk mengatasi kemampuan guru dalam penggunaan IT. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dari ke empat aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang keempatnya menunjukkan pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik, sehingga secara keseluruhan implementasi kebijakan sertifikasi guru SMP di Kabupaten Mamasa dinilai sudah berjalan dengan baik. 2) Faktor determinan pendukung keberhasilan kebijakan sertifikasi guru pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Mamasa yang dinilai terlaksana dengan baik dikarenakan adanya faktor struktur birokrasi yang telah terjadi pembagian tugas dengan baik serta adanya *Standart Operational Prosedural* (SOP) atau buku petunjuk teknis sertifikasi. Selain daripada itu, faktor pendukung lainnya ialah aspek komunikasi yang dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi. 3) Upaya Dinas Pendidikan untuk mengatasi kemampuan guru dalam penggunaan IT yaitu melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait sistem pelaksanaan sertifikasi guru berbasis *online*.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sertifikasi Guru

## ABSTRACT

**YUSTINA. 2020.** *Implementation of Secondary School Teacher Certification Policies in Mamasa District* (supervised by Rifdan and Risma Niswaty).

Education is the most important aspect in an effort to improve the quality of human resources to be able to compete in the midst of the increasingly advanced and modern competition in life. The Ministry of National Education has taken a path to further improve the quality of education in Indonesia by improving the quality of human resources through the teacher certification policy stipulated in Permendiknas Number 11 of 2011 concerning Teacher Certification in position and the latest regulation of Permendikbud No 37 of 2017 concerning Certification for Teachers in position which aim to increase teacher professionalism in conducting their duties and functions. The objectives of the study are 1) to examine and describe the implementation of the secondary school teacher certification policy in Mamasa district from the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, 2) to identify and analyze the determinant factors supporting the implementation of the secondary school teacher certification policy in Mamasa district, and 3) to discover the efforts made by the Mamasa District Education Office to overcome the ability of teachers to use IT. This research is a qualitative type using a phenomenological approach. Data collection techniques used through structured interviews, observation, and documentation. The data analysis technique of the study used an interactive model of data analysis. The results of the study reveal that 1) all the four aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure show that the implementation had been conducted well, so overall the implementation of the secondary school teacher certification policy in Mamasa district is considered to be running well, 2) the determinant factors that support the success of the teacher certification policy at secondary schools in Mamasa district are considered to be carried out well due to the bureaucratic structure that has occurred with a good division of tasks and the existence of Standard Operational Procedures (SOP) or technical certification manuals. Apart from that, another supporting factor is the aspect of communication conducted through various socialization activities, and 3) the efforts of Education Office to overcome the ability of teachers to use IT, are through the activities of Technical Guidance (Bimtek) related to the online-based teacher certification implementation system.

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, agar mampu bersaing di tengah kompetisi kehidupan berbangsa yang semakin maju dan modern. Suatu negara dikatakan maju, modern, dan sejahtera, jika memiliki sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. Tanpa adanya pendidikan yang memadai dan berkualitas, maka suatu bangsa negara akan semakin tertinggal.

Kementerian Pendidikan Nasional akhirnya mengambil jalan untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya para guru karena sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola oleh manusia. Pendidikan terdiri atas tiga tahap yaitu input, proses dan output. Tahap terpenting adalah pada tahap proses dimana siswa diasah oleh tenaga pendidik untuk output yang lebih baik. Meningkatkan kualitas pendidikan merupakan proses yang terintegrasi dengan proses

pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Upaya pemerintah yang dilakukan mengenai peningkatan kualitas pendidikan dengan cara pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar serta pemberian sertifikat pendidik bagi guru.

Sehubungan dengan itu, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), telah melakukan berbagai macam upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia dengan memberi perhatian khusus kepada para guru. Salah satu upayanya adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan peningkatan profesionalitas tenaga guru dengan kebijakan sertifikasi.

Kebijakan sertifikasi guru diatur melalui melalui Permendiknas No 18/2007 yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Guru dan Dosen No. 14/2005, serta Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Salah satu cara untuk meningkatkan profesionalitas guru adalah dengan memberi guru sertifikat pendidik. Berdasarkan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 42 dan 61 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 dan PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 29, guru pada jenis dan jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 (Strata Satu) atau D IV (Diploma IV) sesuai dengan bidang tugasnya, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sertifikasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 butir 11 adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen. Sedangkan pasal 8 berisi tentang kewajiban guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dapat diartikan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

Setelah berjalan hampir tiga tahun, proses pelaksanaan sertifikasi guru yang telah berlangsung sejak 2006-2008, tidak luput dari permasalahan di lapangan. Diantaranya adalah terlalu beratnya persyaratan pengumpulan dokumen portofolio. Dalam Permendiknas Nomor 18/2007, dalam jabatan disebutkan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio atau penilaian kumpulan dokumen yang mencerminkan Jika kesepuluh komponen tersebut telah dapat terpenuhi secara obyektif dengan mencapai skor minimal 850 atau 57% dari perkiraan skor maksimum (1500), maka yang bersangkutan bisa dipastikan untuk berhak menyangand predikat sebagai guru profesional, beserta sejumlah hak dan fasilitas yang melekat dengan jabatannya.

Untuk melihat lebih jauh proses implementasi kebijakan sertifikasi guru, maka perlu untuk melakukan kajian yang mendalam dalam rangka menelaah lebih jauh pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Sejauhmana kebijakan sertifikasi berdampak pada profesionalitas

guru. Oleh karena itu, menarik untuk dilakukan kajian atau penelitian lebih jauh mengenai hal tersebut.

Penelitian implementasi kebijakan sertifikasi guru ini, difokuskan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Mamasa. Hal ini karena ketika peneliti melakukan observasi awal, diperoleh gambaran bahwa permasalahan sertifikasi guru antara lain:

1. Belum lengkapnya perangkat teknis terutama pada aspek pengawasan yang menjadi pedoman dalam melakukan penelitian berkas guru.
2. Demi mengejar tambahan tunjangan dan insentif para guru berlomba-lomba untuk memenuhi segala persyaratan meski kerap kali ada yang disinyalir data yang diusulkan itu palsu (Eko Hadi Sujiono sebagai ketua Rayon 24 (2009).
3. Kebijakan sertifikasi guru juga menyisahkan persoalan tersendiri terutama pada aspek rekrutmen peserta sertifikasi guru. Kondisi di Kabupaten Mamasa, jumlah guru yang sudah tersertifikasi mulai dari tahun 2013 sampai pada tahun 2018, guru SMP sebanyak 54 guru (49 PNS dan 5 non PNS) dari jumlah total guru SMP 310 guru (Diknas Kabupaten Mamasa, 2019).
4. Implementasi kebijakan sertifikasi guru, juga terletak pada sikap pelaksana mengenai mekanisme sosialisasi serta pola koordinasi lintas kelembagaan yang dianggap kurang memadai.
5. Adanya pengaduan dari calon peserta sertifikasi guru yang mengeluhkan tingkat kesukaran uji kompetensi kelulusan untuk mendapatkan kuota PLPG, diperlukan perhatian khusus dan pendalaman materi melalui bimbingan teknis dalam mengerjakan soal-soal.
6. Dalam proses PLPG, masih tinggi tingkat ketidakkelulusan pesertanya, diperlukan lagi remedial dan keikutsertaan peserta calon sertifikasi guru yang berdampak pada pembiayaan dan penambahan waktu dalam mengikutinya, sehingga berpengaruh pula pada tugas keseharian guru dalam menjalankan proses pembelajaran di sekolah.

Berdasarkan dari uraian permasalahan pada latar belakang di atas, terkait kebijakan sertifikasi guru, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang sertifikasi guru dengan mengangkat judul yaitu: “Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Mamasa”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang akan mengkaji lebih dalam pada fakta yang terjadi di lapangan, kemudian menilai dan menginterpretasikannya terkait dengan implementasi kebijakan sertifikasi guru SMP di Kabupaten Mamasa, Bogdan dan Taylor (1992) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dicermati”. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui atau fenomena yang baru sedikit diketahui.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **Sejarah Singkat Kabupaten Mamasa**

Kabupaten Mamasa merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Barat yang secara administrasi dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 2002 dan terbagi atas 15 kecamatan dengan 167 desa, dan 11 kelurahan. Pada Tahun 2015 terdapat 17 kecamatan, dimana kecamatan Mambi dan Aralle yang memiliki desa dan kelurahan terbanyak yaitu 22 desa/kelurahan. Kabupaten Mamasa termasuk daerah dengan curah hujan dan kelembaban yang tinggi dan beriklim dingin, yang secara topografi merupakan daerah pegunungan. Iklim di wilayah Kabupaten Mamasa sangat dipengaruhi oleh iklim tropika basah yang bercirikan hujan cukup tinggi dengan penyebaran merata sepanjang tahun, sehingga tidak terdapat pergantian musim yang jelas.

Iklim di kabupaten Mamasa dipengaruhi oleh letak geografisnya yaitu dataran tinggi di daerah pegunungan dan dikelilingi oleh bentangan sungai-sungai dengan suhu udara rata-rata 24°C, dimana perbedaan antara suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5°C - 7°C. Jumlah hujan rata-rata 140-180 hari/tahun. Keadaan ini menyebabkan struktur tanah menjadi labil sehingga menimbulkan bencana longsor dan tak jarang menimbulkan banjir. Kabupaten Mamasa memiliki luas wilayah 3005,88 km<sup>2</sup>, dimana Kecamatan Tabulahan merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 513.95 km<sup>2</sup> atau sekitar 17,07% dari seluruh wilayah Kabupaten Mamasa. Sementara luas wilayah terkecil adalah Rantebulahan Timur dengan luas wilayah 31,87 km<sup>2</sup> atau sekitar 1,03 % dari seluruh wilayah Kabupaten Mamasa. Kabupaten Mamasa memiliki jumlah penduduk 147.660 jiwa. Sedangkan Kecamatan Mamasa dengan jumlah penduduk terbesar yaitu sekitar 23.593 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang terkecil adalah Kecamatan Mehalaan dengan jumlah penduduk sebesar 4.086 jiwa.

Secara administratif Kabupaten Mamasa memiliki batas-batas wilayah yaitu: Sebelah Utara dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Mamuju, sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Selatan dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar. Jarak dari ibukota Provinsi Sulawesi Barat (Mamuju) melalui Polewali Mandar dan Majene = 286 Km, sedangkan melalui MambiAralle-Salubatu = 148 Km. Jarak dari Makassar = 340 Km. Letak Astronomi Kabupaten Mamasa berada pada 2°39'216" LU dan 3°19'288" LS serta 119°0'216" BB dan 119°38'144" BT. Diantara 17 kecamatan di Kabupaten Mamasa, kecamatan yang letaknya terjauh dari ibukota kabupaten (Kabupaten Mamasa) adalah kecamatan Pana yaitu sejauh 95 km, sementara kecamatan yang terdekat dari ibukota kabupaten adalah kecamatan Tawalian yang berjarak 3 km.

### **B. Hasil Penelitian**

#### **1. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SMP di Kabupaten Mamasa**

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan sertifikasi guru SMP yang dapat dilihat dari 4 (empat) aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi serta faktor penghambat implementasi kebijakan sertifikasi guru SMP di Kabupaten Mamasa. Data hasil penelitian terhadap keempat aspek tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian, observasi dan dokumentasi. Untuk lebih jelasnya, akan diuraikan sebagai berikut.

**a) Komunikasi**

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari satu sumber berita kepada penerima melalui media tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari penerima. Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarkan informasi. Untuk menghindari terjadinya gangguan pada komunikasi, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan dan memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi. Komunikasi ada dalam setiap kehidupan manusia. Baik verbal maupun non verbal.

**b) Sumber Daya**

Sumber daya merupakan suatu hal yang diperlukan dalam melaksanakan suatu maksud tertentu yang telah ditetapkan. Sumber daya berguna untuk menunjang implementasi dari suatu kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang mencukupi dan memadai, implementasi sebuah kebijakan akan terganggu.

**c) Disposisi**

Disposisi adalah kepribadian atau pandangan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan publik. Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan berperan penting dalam sukses tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan. Sikap dan pandangan tiap orang berbeda akan suatu hal. Oleh karena itu penempatan staf dalam melaksanakan suatu kebijakan didasarkan pada sikap dan pandangan yang dimiliki. Staf-staf dalam pelaksanaan kebijakan dipilih karena memiliki sikap dan pandangan yang relatif sama dengan pemimpin dan berkeahlian cukup.

**d) Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi menurut Edward III dibagi menjadi SOP (*Standard Operating ProchEDURE*) dan adanya *fragmentation*. SOP mempunyai fungsi menyamakan kegiatan yang ada dalam struktur birokrasi dan aturan-aturan. Selain itu SOP berguna agar proses yang ada dalam birokrasi dapat berjalan dengan konsisten, efektif, efisien sehingga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada.

**2. Faktor Determinan Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SMP Kabupaten Mamasa**

Dalam penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Mamasa. Keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru SMP di

Kabupaten Mamasa tidak terlepas dengan adanya faktor pendukung yang sangat memberikan kontribusi besar, seperti faktor struktur birokrasi yang dimana Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa sebagai pelaksana atas kebijakan yang bertugas melakukan pembagian tugas kepada pegawai dinas untuk menyukseskan kebijakan tersebut.

### **3. Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa untuk mengatasi kemampuan guru dalam penggunaan IT**

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak dapat dihindari pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama yang menjadi pondasi utama ialah kompetensi guru. Dengan hadirnya kebijakan sertifikasi guru yang bertujuan meningkatkan kompetensi para guru serta memberikan tunjangan kesejahteraan bagi guru. Melihat kondisi kemampuan guru saat ini, baik yang sedang mengikuti proses penyeleksian sertifikasi guru maupun yang telah lulus sertifikasi guru yang dinilai masih banyak guru yang ditemukan kurang memiliki kemampuan dalam penggunaan Teknologi Informasi (IT), dan hal inilah yang menjadi tugas dan perhatian bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa untuk mengatasi persoalan tersebut.

## **C. Pembahasan**

### **1. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SMP di Kabupaten Mamasa**

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru SMP di Kabupaten Mamasa sudah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari keempat aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang menjadi indikator dalam penelitian ini semuanya menunjukkan pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik.

#### **a) Komunikasi**

Menurut Agustino (2006:157) “komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

#### **b) Sumber Daya**

Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi” (Tachjan, 2006:135).

### **c) Disposisi**

Disposisi menurut Edwards III diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Disposisi merupakan watak dan karakter yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Karakteristik dari para pelaksana akan sangat menentukan berjalannya implementasi dengan efektif. Dimensi ini mencakup tanggung jawab dalam menempatkan staf dan insentif. Disposisi implementor atau kecenderungan pelaksana merupakan faktor ketiga dalam implementasi kebijakan yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Menurut Edwards dalam Winarno (2002: 143), terkait disposisi implementor, ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana.

### **d) Struktur Birokrasi**

Menurut Edwards III, dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah melakukan *Standar Operating Procedures* (SOP) dan melaksanakan fragmentasi. SOP adalah kegiatan rutin yang memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatannya pada tiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas pelaksana diantara beberapa unit kerja.

## **2. Faktor Determinan Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SMP di Kabupaten Mamasa**

Faktor determinan pendukung kebijakan sertifikasi guru SMP di Kabupaten Mamasa dari keempat aspek sehingga sertifikasi guru dapat terlaksana secara baik yaitu aspek struktur birokrasi yang dimana Dinas Pendidikan sebagai pelaksana kebijakan telah membentuk dan membagi tugas kepada pegawai dinas serta adanya SOP atau buku petunjuk teknis sertifikasi yang telah disediakan bagi sekolah untuk memudahkan para guru mengikuti sertifikasi guru. Selain itu, faktor lainnya ialah aspek komunikasi yang dimana dilakukannya berbagai kegiatan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa.

## **3. Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa untuk mengatasi kemampuan guru dalam penggunaan IT**

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan tentang upaya Dinas Pendidikan Untuk mengatasi kemampuan guru dalam penggunaan IT yang dinilai sudah optimal, hal ini dikarenakan adanya berbagai upaya yang dilakukan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa mulai dari memberikan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, diklat sampai pada kegiatan himbauan yang seringkali disampaikan kepada para guru untuk selalu memanfaatkan teknologi sebagai media atau sarana yang lebih efisien dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di lihat beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian ke empat aspek di atas yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang keempatnya menunjukkan pelaksanaannya sudah baik, sehingga secara keseluruhan implementasi kebijakan sertifikasi guru SMP di Kabupaten Mamasa sudah terlaksana secara baik.
2. Faktor determinan pendukung kebijakan sertifikasi guru SMP di Kabupaten Mamasa yaitu aspek struktur birokrasi yang dimana Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa sebagai pelaksana kebijakan yang telah membentuk pembagian tugas kepada pegawai dinas untuk menyukseskan kebijakan tersebut serta adanya *Standart Operational Prosedural* (SOP) atau buku petunjuk teknis sertifikasi yang telah disediakan bagi sekolah sebagai pedoman atau petunjuk bagi para guru untuk mengikuti sertifikasi guru. Selain daripada itu, faktor pendukung lainnya ialah aspek komunikasi yang telah berjalan secara baik dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi sistem pelaksanaan sertifikasi.
3. Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa untuk mengatasi kemampuan guru dalam penggunaan IT yaitu melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait sistem pelaksanaan sertifikasi guru berbasis online. Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang bekerjasama dengan LPM Kabupaten Majene.

## REFERENSI

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*, Jakarta, Suara Bebas.
- Abustam, Idrus. 2006. *Filsafat dan Metodologi Penelitian*. Materi Kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif, Jurusan Administrasi Publik Program Pascasarjana.
- Ahmad. 1993. *Financing of Education: Opportunities and Alternatives*, Ministry of Education, Islamabad.
- Alexander.1991, *Succesfully Implementing Strategic Decisions; Turning Strategy into Action*, Ken Irons, ed. Oxford: Pergamon Press
- Baedhowi dan Hartoyo, 2009, *Sertifikasi Guru tidak tepat sasaran*, Edukasi Kompas.
- Bardach, 1977, *The Implementation* 168 *What Happens After a Bill Becomes a Law*, Cambridge : MIT Pres
- Budiarti, 2008, *Bahan Ajar MataKuliah Pedagogik Transformatif Program Sertifikasi Guru IPS*, Jakarta: Universitas Negari Jakarta.
- Budimansyah, Dasim. 2010. *Merefleksi Mutu Pendidikan*. <http://file.upi.edu>. Diakses tanggal 14 Maret 2012.
- Cohen , John M. And Stephen B. Peterson. 1990, *Administrative Decentralization, Strategies for Developing Countries*, Connecticut: Kumarian Press

- Danim, Sudarwan. 2002, *Inovasi Pendidikan: Upaya Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dunn, William N. 2000, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwi Kurniawan, Bachtiar. 2011. *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam rangka meningkatkan Profesionalisme Guru di Kota Yogyakarta*, Yogyakarta.
- Edison, Emron. 2009. *Human Resource Development: Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung: Alfabeta

- Effendi, Sofyan, dkk. 1993. *Membangun Martabat Manusia, Peranan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press bekerjasama dengan HIPIIS ab. Jogjakarta.
- Gomes, Faustino Carduso, 1999, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jojakarta: Andi Offset
- Gupta, Dipak K. 2001, *Analizing Public Policy: Concepts, Tools and Techniques*. Washington DC: CQ Press.
- Handoko, T Hani. 1987. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hasibuan, M. 1984. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Irawan, Prasetya, 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*, Jakarta: UI Press
- Jalal, Fasli. 2007. *Tanggung Jawab tentang Sertifikasi Guru*, Jakarta: Depdiknas Direktorat Jenderal PMKPTK.
- Jones, Charles.o, 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Penerjemah Ricky Istanto, Jakarta : Rajawali Pers.
- Kadji, Yulianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Realitas*. Jakarta: Cahaya Abadi.
- Keban, Yermias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2010. *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan : Buku 1, Buku 2, Buku 3, Buku 4*. Jakarta
- Kim. 2007. *Educational Policy dan Reforms in Korea*, Korean Educational Development Institute.
- Lembaga Administrasi Negara Republik. 2005. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI), Buku III: Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara*, Jakarta.
- Malkab, Marnih. 2015, *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kota Makassar, Disertasi Pascasarjana Universitas Negeri Makassar*
- Mulyasa, 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Rosda Karya.
- 2008. *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan*, Bandung: Rosda Karya.
- Mustopadidjaya. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan*, Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
- Nugroho D. Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- 2006. *Kebijakan Publik: untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Admistrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Brokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang *Guru*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang *Standar kualifikasi dan Kompetensi Guru dalam Jabatan*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 tahun 2011 tentang *Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan*.
- Sagala, Syaiful. 2009. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Alfabeta.
- Salusu, Jonathan. 1998. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Siagin, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.